

Bupati Eka Putra Perkuat Sinergi Wali Nagari dan OPD untuk Kemajuan Tanah Datar

Linda Sari - TANAHDATAR.WARTAWAN.ORG

Mar 9, 2026 - 23:42



Bupati Tanah Datar, Eka Putra, bersama Wakil Bupati Ahmad Fadly, menggelar pertemuan silaturahmi dan berbuka puasa bersama Forum Komunikasi Wali Nagari (FKWN) di Gedung Indojolito Batusangkar, Senin (9/3/2026)

Tanah Datar - Bupati Tanah Datar, Eka Putra, bersama Wakil Bupati Ahmad Fadly, menggelar pertemuan silaturahmi dan berbuka puasa bersama Forum Komunikasi Wali Nagari (FKWN) di Gedung Indojolito Batusangkar, Senin (9/3/2026). Momen ini menjadi ajang krusial untuk merajut keharmonisan antara pemerintah kabupaten dan para pemimpin nagari, sekaligus membedah tuntas

berbagai tantangan yang dihadapi, terutama isu keterbatasan anggaran.

Ketua FKWN Tanah Datar, Genta Maulana, tak lupa menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas inisiatif Bupati Eka Putra. Ia mengapresiasi perhatian Bupati terhadap aspirasi para wali nagari, khususnya terkait penyesuaian anggaran yang dirasa masih belum memadai untuk menjalankan program pembangunan secara optimal.

“Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah mengagendakan silaturahmi dan berbuka puasa bersama kami. Kami juga berterima kasih karena Bapak Bupati telah memperjuangkan aspirasi wali nagari pada forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia beberapa waktu lalu terkait berkurangnya anggaran nagari. Mudah-mudahan banyak harapan yang dapat terwujud,” ujar Genta Maulana.

Genta memaparkan, rata-rata anggaran yang kini diterima oleh nagari berkisar antara Rp250 juta hingga Rp350 juta. Dana tersebut, menurutnya, kerap kali belum cukup untuk mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan. “Karena itu kami sangat berharap kepada Bapak Bupati untuk terus memperjuangkan peningkatan anggaran nagari melalui pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Eka Putra membenarkan bahwa isu anggaran nagari telah diangkat dalam forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan disampaikan langsung kepada Kementerian Desa. Ia mengakui bahwa dengan anggaran rata-rata Rp250 juta hingga Rp350 juta, ruang gerak pembangunan di nagari memang menjadi sangat terbatas.

“Alhamdulillah pada kesempatan itu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa menyampaikan akan melakukan kajian ulang untuk meningkatkan kembali anggaran bagi desa atau nagari,” jelas Bupati Eka Putra, mengutip respons positif dari forum tersebut.

Lebih lanjut, Bupati Eka Putra mengingatkan para wali nagari akan pentingnya proaktif dalam menangani persoalan pembangunan di wilayah masing-masing. Ia menekankan perlunya koordinasi segera dengan dinas terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), untuk penanganan awal jalan rusak melalui metode *patching* atau penambalan.

“Saya minta kepada wali nagari untuk segera membuat surat dan berkoordinasi dengan Dinas PU agar dilakukan *patching* pada jalan-jalan yang rusak di nagari masing-masing,” tegasnya.

Bupati juga menginstruksikan agar usulan perbaikan irigasi, utamanya yang terdampak bencana dan menjadi prioritas pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, segera diajukan. Keaktifan para wali nagari dalam menjalin komunikasi dengan perangkat daerah, memantau usulan program, serta bersinergi dengan wakil rakyat di berbagai tingkatan, mulai dari DPRD hingga DPR RI, dinilai sangat vital.

Selain itu, para wali nagari diharapkan tidak lengah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai program pembangunan yang sedang

dan akan dilaksanakan di nagari mereka.

Wakil Bupati Ahmad Fadly turut menambahkan pentingnya sosialisasi program unggulan pemerintah daerah, khususnya terkait layanan bantuan sosial kesehatan. Ia menekankan agar tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait pelayanan di kantor wali nagari, dan memastikan setiap warga terbantu, terutama dalam persoalan kesehatan.

“Jangan sampai ada lagi masyarakat yang mengeluhkan pelayanan di kantor wali nagari. Kita harus memastikan masyarakat terbantu, sehingga tidak ada yang terlantar dalam persoalan kesehatan,” ujar Wakil Bupati.

Peran nagari dalam penanganan *stunting* juga menjadi sorotan. Para wali nagari diminta memastikan program pencegahan dan penurunan *stunting* berjalan efektif demi masa depan generasi penerus dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Tanah Datar secara keseluruhan.

“Persoalan *stunting* bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan anak-anak kita dan kualitas kehidupan masyarakat ke depan,” katanya.

Sekretaris Daerah Tanah Datar, Abdurrahman Hadi, menambahkan harapan agar seluruh perangkat daerah senantiasa membangun koordinasi yang solid dan menjaga kekompakan sebagai satu kesatuan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Acara ini turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Elizar, Kepala Dinas PMDPPKB Herison, para kepala bagian, serta camat se-Kabupaten Tanah Datar. (**)